

Kepada Yth,

1. Pimpinan Sinar Mas Group

Plaza Sinar Mas Land, Tower 2, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat (10350), Indonesia. Telp. +62 21 50338899 dan Faks: +62 21 50389999.

2. Pimpinan PT. Sawit Mas Sejahtera

Jl. Kol. Burlian, Kavling Blok A-3, RT.009/003, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Utara (31414) Telp. +731 323123 dan Fax: +731 322005

“PROTES KERAS”

Atas Tindakan Sewenang-wenang Perusahaan PT. Sawit Mas Sejahtera terhadap Buruh Perkebunan dan Aktifis Serikat Buruh (GSBI)

Pada Rabu, 09 Januari 2019, kami menerima surat panggilan solidaritas dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI, Jakarta), terkait Surat Keputusan No. 001/SKME/PHK/I/2009, tanggal 08 Januari 2018, tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap **Fauzi Azwar**, buruh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Mas Sejahtera – SKMR, yang beralamatkan di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Surat Keputusan ini ditandatangani oleh Heriyanto, Estate Manager PT. SMS-SKME, tanpa ada penjelasan alasan-alasan PHK atau pemberhentian, kecuali pertimbangan kebutuhan operasional perusahaan. Sebelumnya Desember 2017, perusahaan PT. SMS – SKME juga melakukan PHK terhadap empat orang buruh, yakni: Azwar, Sech Nurahman, Koni dan Iskandar Dinata, dengan dalil efisiensi.

Pemecatan buruh ini diduga karena aktifitas mereka sebagai pembela hak-hak buruh. Fauzi Azwar adalah Ketua PTP. SBPKS GSBI dan menjabat sebagai Sekretaris DPC GSBI Kabupaten Lahat, Sumatera Utara. Demikian pula, empat orang buruh yang dipecat sebelumnya merupakan pengurus inti SBPKS GSBI. Mereka terlibat aktif menyuarkan hak-hak buruh, kebebasan berserikat, upah buruh murah, kelebihan jam kerja tanpa upah, kesehatan dan keselamatan kerja, serta hak atas kesejahteraan buruh.

Selain itu, Manager Personalia PT. SMS – SKME, menjelaskan alasan pemecatan tersebut merupakan keinginan pimpinan perusahaan di Jakarta karena aktifitas Fauzi Azwar, yang turut menandatangani Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pimpinan Negara Anggota Uni Eropa terkait Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit (Mei 2018). Sikap dan dukungan Fauzi dianggap tidak sejalan dengan kepentingan dan tujuan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kami pimpinan dan aktifis serikat dan organisasi buruh, petani, masyarakat adat, pembela HAM dan lingkungan, menyatakan:

1. “Protes Keras” atas tindakan kesewenang-wenangan pimpinan perusahaan PT. SMS – SKME yang melakukan pemecatan terhadap buruh dan aktifis buruh SBPKS GSBI. Keputusan dan tindakan pemecatan tersebut dilakukan secara sepihak dan merugikan hak-hak buruh maupun keluarganya. Praktik pemecatan tersebut merupakan bagian dari cara-cara jahat, tidak

- bertanggung jawab dan curang untuk mengeksploitasi buruh murah dan tindakan diskriminatif.
2. Keputusan dan tindakan perusahaan PT. SMS – SKME tersebut jelas bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, instrument international tentang Hak Sipol dan Ecosoc, serta ketentuan standar RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil), terkait hak-hak buruh, hak atas kebebasan berpendapat dan berserikat, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak atas upah layak, termasuk hak atas upah kerja lembur, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk bernegosiasi dan terlibat dalam pengambilan keputusan, hak untuk mogok kerja, hak hidup sejahtera, perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
 3. Kami meminta pihak perusahaan PT. SMS – SKME, sebagai bagian dari anak perusahaan Sinar Mas Group dan anggota RSPO, seharusnya patuh pada peraturan perundang-undangan dan komitmen atas kebijakan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Karenanya, kami mendesak perusahaan untuk mempekerjakan kembali buruh yang dipecat dan memenuhi seluruh hak-hak buruh, serta konsisten melindungi dan menghormati hak-hak buruh.
 4. Kami meminta kepada pemerintah daerah setempat, Dinas Ketenagakerjaan, Kementerian Pertanian dan Sekretariat RSPO, untuk melakukan audit hak-hak buruh perusahaan perkebunan PT. SMS - SKME dan memberikan sanksi yang adil atas pelanggaran perusahaan PT. SMS - SKME, termasuk mempekerjakan kembali para buruh yang dipecat tanpa alasan dan tanpa melibatkan buruh, termasuk yang aktif dalam serikat buruh.
 5. Kami turut prihatin dan bersolidaritas atas buruh dan serikat buruh yang mengalami kemalangan penderitaan dan penindasan. Kami juga meminta kepada kawan-kawan pimpinan serikat dan organisasi gerakan perjuangan untuk mengambil bagian melawan sistem ekonomi perkebunan yang menindas, serta mendesak pemerintah dan korporasi untuk melindungi, menghormati dan memulihkan hak-hak buruh.

Jakarta, 10 Januari 2019

Hormat Kami,

Penandatanganan Surat Terlampir

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI, Jakarta
2. Dirjen Perkebunan, Menteri Pertanian RI, Jakarta
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan
4. Sekretariat RSPO, Jakarta
5. Pimpinan Pusat GSBI, Jakarta

Lampiran: Penandatanganan dan Pendukung Surat

1. Franky Samperante, Yayasan Pusaka, Jakarta
2. Sri Palupi, Institute for Ecosoc Rights, Jakarta
3. Pst. Paulus Rahmat, SVD, Vivat Internasional, Jakarta
4. Pius Ginting, AEER, Jakarta
5. I Ngunrah Suryawan, Akademisi UNIPA, Manokwari, Papua Barat
6. Wiryu Supriyadi, Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua, Jayapura, Papua
7. Ismail Keikyera, Dewan Masyarakat Adat Momuna, Yahukimo, Papua
8. Asep Komarudin, Greenpeace Indonesia, Jakarta
9. Arie Rio Rompas, Greenpeace Indonesia, Jakarta
10. Yohanes Akwan, GSBI Papua Barat, Manokwari, Papua Barat
11. Engel Nibaeli, GSBI Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, Papua Barat
12. Michel Moktis, SBPKS Medco, Manokwari, Papua Barat
13. Gustavo Wanma, Serikat Pekerja Media Papua Barat, Manokwari, Papua Barat
14. Duma Sanda, Serikat Pekerja Media Cahaya Papua, Manokwari, Papua Barat
15. Deby Santoso, DPC GSBI Kota Sorong, Papua Barat
16. Sari Manggaprouw, Serikat Pekerja Perempuan Papua Barat, Manokwari
17. Musa Mambrasar, DPC GSBI Kabupaten Manokwari, Papua Barat
18. Nail, DPC GSBI Kaimana, Papua Barat
19. Wem Wisido, Serikat Buruh Pelabuhan Manokwari, Papua Barat
20. Terianus Mariawasi, Perkumpulan Bin Madag Hom, Teluk Bintuni, Papua Barat
21. Jufriansyah, STABIL, Balikpapan, Kalimantan Timur
22. Inda Fatinaware, SAWIT WATCH, Bogor, Jawa Barat
23. Ignatius Hanyang, Yayasan Nurani Perempuan, Samarinda, Kalimantan Timur
24. Agus Sutomo, LinkAR Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat
25. Johnny Teddy Wakum, LBH Papua, Jayapura, Papua
26. Naomi Marasian, Pt PPMA Papua, Jayapura, Papua
27. Yohanis Mambrasar, Perkumpulan Advokat HAM untuk Papua (PAHAM), Jayapura, Papua
28. Anum Siregar, Aliansi Demokrasi untuk Papua (ALDP), Jayapura, Papua
29. Lidya Monaliza Upuya, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Papua
30. Pdt. Magdalena Kafiar, STh, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Papua
31. Bernard Koten, SKPKC Fransiskan Papua, Jayapura, Papua
32. Bu Suri, Serikat Buruh Kebun Setawar, Kalimantan Barat
33. Roni, Serikat Buruh Kelapa Sawit, Ketapang, Kalimantan Barat
34. Esti Kristianti, SH, LBH Borneo, Pontianak, Kalimantan Barat
35. Pst. Anselmus Amo, MSC, SKP Keuskupan Agung Merauke, Papua
36. Johannes Jenito, Perkumpulan Kaoem Telapak, Bogor, Jawa Barat
37. Luis, PBH Cenderawasih, Jayapura, Papua
38. Maurits Aiesh Rumbekwan, ED WALHI Papua, Jayapura, Papua
39. Dewi Kartika, Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta
40. Cion Alexander, Serikat Petani Kelapa Sawit, Sanggau, Kalimantan Barat
41. Kartika Sari, PROGRESS, Palangkaraya, Kalimantan Tengah
42. Ahmad Saja, Padi Indonesia, Balikpapan, Kalimantan Timur
43. Zulkifli Gampo Chino, Yayasan Nagari Institute – Pusat Studi dan Advokasi Masyarakat Adat, Pasaman, Sumatera Barat
44. Rudi, ED Walhi Jambi, Jambi
45. Damairia Pakpahan, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Jakarta
46. Sorang Saragih, Asia Justice and Rights (AJAR), Jakarta
47. Veronica Koman, Pengacara HAM, Jakarta
48. Wahyu Susilo, Migrant Care, Jakarta
49. Ferry Rangi, Celebes Institute, Sulawesi Tengah

50. Firmansyah Jumanto Balasa, DPD GSBI Kalimantan Barat
51. Fitri Arianti, Rainforest Action Network, Jakarta
52. Asfinawati, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta
53. Roy Murtadho, Komite Nasional FNKSDA, Bogor, Jawa Barat.
54. Rut Ohoiwutun, Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA), Jayapura, Papua
55. Pdt. Dora Balubun, STh, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Papua
56. Dianto Bachriadi, akademisi Universitas Kyoto, Bandung, Jawa Barat.
57. Ronald Manufandu, Koalisi Peduli HAM dan Lingkungan Hidup (KAPHLING), Jayapura, Papua
58. Karolina Onim, KPKC Sinode GKI di Tanah Papua, Jayapura, Papua
59. Mulyadi, Social Analysis and Research Institute (SARI), Solo, Jawa Tengah
60. Dainto Arifin, Serikat Pekerja Sawit Indonesia (SEPASI), Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
61. Bambang Dahana, aktifis buruh, Jakarta.
62. Yati Andriyani, KONTRAS, Jakarta
63. Mukti Surahman, KPC GSBI Karawang
64. Ani Nurhayato, GSBI PT. Sungintex, Kota Bekasi, Jawa Barat
65. Kokom Komalawati, GSBI PT. Panarub Dwikarya, Kota Tangerang, Banten
66. Dadeng Nazarudin, GSBI Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat
67. Didi Iskandar, GSBI Kabupaten Karawang, Jawa Barat
68. Ahmadsyah, GSBI Sumatera Utara
69. Sujak Supriyadi, GSBI DKI Jakarta
70. Thomas Sugiyono, GSBI PT. SAP, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
71. Emusmulyadi, GSBI PT. BCI, Karawang, Jawa Barat
72. Amir Mahmud, GSBI PT. Daelim Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
73. Tarmidi, GSBI PT. Dili, Cikarang Bekasi, Jawa Barat
74. Jemirah, GSBI PT. VCI, Kabupaten Tangerang, Banten
75. A. Fadillah, GSBI PT. FI, Bekasi, Jawa Barat
76. Adi Setio, GSBI PT. AJIEIndonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
77. Andriko Itang, Trade Union Rights Centre (TURC), Jakarta
78. Uus Saefuloh Rahman, GSBI PT. Asietex Sinar Indopratama, Karawang, Jawa Barat
79. Naimatullailiyah, GSBI PT. AJE Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat
80. Halil Machfud, GSBI PT. ADI, Tangerang, Banten.
81. Kariyono, GSBI Jombang, Jawa Timur
82. Sidik Mustofa, GSBI PT. Asietec Sinar Indoprama, Karawang, Bekasi, Jawa Barat
83. Triana Kurnia Wardani, Serikat Perempuan Indonesia(SERUNI)
84. Kurniawan Sabar, Instiute for National and Democracy Studies (INDIES), Jakarta
85. Raden Deden Fajarullah, Serikat Demoratik Mahasiswa Nasional (SDMN), Jakarta
86. Rudi HB. Daman; Front Perjuangan Rakyat (FPR), Jakarta
87. Sympati Dimas, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Jakarta
88. Sidik Mustofa, SPM-GSBI PT.ASI, Karawang-Jawa Barat
89. Halil Machfud, SBGTS-GSBI PT. ADI Tangerang – Banten
90. Manik Indramaja, SBGTS-GSBI PT FI, Bekasi-Jawa Barat
91. MH. Lalu Hari Sandy AME, ILPS-Chapter Indonesia, Jakarta
92. Karsiweng, Keluar Besar Buruh Migrant Indonesia (KABARBUMI), Jakarta
93. Catur Widi Asmoro, Pemuda Baru Indonesia (PEMBARU-Indonesia), Jakarta
94. Rahmat Ajiguna, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Jakarta
95. Karyono, GSBI Jombang, Jawa Timur
96. Jefri Sagala, GSBI PT. Asiatex Sinar Indopratama, Karawang, Jawa Barat
97. Rahmat Hidayat Kusuma, GSBI PT. Beesco Indonesia, Karawang, Jawa Barat